

TRENDS IN ISLAMIC THOUGHT TODAY (WACANA SYARI'AT ISLAM SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Hamzah Tualeka Zn

Dosen Prodi Studi Agama-agama Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Abstract

Lord Meghnad Desai brings three forms of Islamism , Islamism moral , Islamism National and Global Islamism . Islamism moral , is that the Muslim-majority country should act according to the teachings of Islam . National Islamism , is that if there is a Muslim majority , the government should follow the Qur'an as a guide and Sharia law , and so on . Global Islamism is that Muslims must understand the history of underdevelopment (after glory for seven centuries) and fought reclaiming power.

Abstraksi

Lord Meghnad Desai mengusung tiga bentuk Islamisme, *Islamisme moral, Islamisme Nasional dan Islamisme Global*. Islamisme moral, ialah bahwa negara dengan mayoritas Muslim hendaknya bertindak menurut ajaran Islam. Islamisme nasional, ialah bahwa jika ada mayoritas Muslim, pemerintah sebaiknya mengikuti Qur'an sebagai panduannya dan hukum Syariah, dan seterusnya. Islamisme global ialah bahwa kaum Muslimin harus memahami sejarah keterbelakangannya (setelah kejayaannya selama tujuh abad) dan berjuang mereklamasi kembali kekuasaan.

A. Pendahuluan

Sejarah dunia mencatat, bahwa tragedi 11 September 2001 yang meluluhlantakkan gedung WTC di Amerika Serikat, merupakan contoh aktual sebuah fenomena yang mengindikasikan tentang rentan dan rumitnya persinggungan antara agama dan politik. Efek dari tragedi ini menegaskan hal itu. Kompleksitas, kerentanan dan kerumitan persoalan ini terpresentasikan dalam sebuah etimologi yang cukup kontroversi dan problematis hingga saat ini, yakni terorisme. Paska tragedi WTC, istilah terorisme spontan mencuat menjadi isu utama dalam wacana politik global.¹

Berbagai definisi dan pemahaman beragam yang diajukan untuk mengidentifikasi makna dan istilah ini, demikian juga dengan teori-teori perihalar

¹Amin Saikal, Islam dan Barat, *Konflik atau Kerjasama* (Yogyakarta: Sanabil) 2006, 8.

belakang kemunculan teror tersebut. Aneka perspektif digunakan sebagai kaca mata analisisnya, sehingga banyak pemikir dan pengamat sampai pada kesimpulan yang tidak sama. Ada yang menisbatkan latar belakang meruaknya tindakan teror dengan persoalan agama, dominasi politik global, k timpangan sosial-ekonomi antarnegara dunia pertama dengan negara dunia kedua dan ketiga, atau bahkan sebagian mengendus problem ini sebagai validasi dari teror Huntington yang memprediksi akan terjadinya *Clash of Civilization* (Benturan Peradaban). Dari kerangka teori yang terakhir ini, timbul segmentasi yang disebut dengan *Barat dan Islam*. Mana dan siapa yang termasuk kategori *Barat dan Bukan Barat* serta *Islam dan Bukan Islam*. Menjadi kontroversi dan problematika lagi; apa standar atau kategorinya, masih belum jelas. Hingga kini, wacana terorisme terus bergulir dan menjadi perbincangan serius. Yang jelas, masing-masing pengamatan dan teori tersebut memiliki dasar argumentasi dan logikanya sendiri.²

Terlepas dari itu semua, apa yang disebut dengan gejala *Terorisme Internasional*, secara faktual berdampak serius pada kurang harmonisnya relasi antara beberapa negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Ketidak harmonisan ini pada tataran yang lebih luas, mengarah pada terbangunnya opini global yang cenderung mengidentifikasi Islam sebagai sebuah konsep ajaran agama yang melegitimasi dilakukannya tindakan teror demi tercapainya sebuah tujuan tertentu. Seharusnya masalah ini dilihat secara proporsional dan objektif sesuai dengan dominan persoalannya. Tindakan teror, mungkin dilakukan oleh sebagian umat Islam, namun hal itu tidak bisa dijadikan titik tolak untuk mengeneralisir Islam sebagai agama teror. Itu merupakan sebuah hasil pemahaman dan interpretasi sebagian umat Islam terhadap ajaran agamanya. Di sisi lain, sebagian umat Islam juga memiliki pemahaman dan interpretasi yang mungkin justru sebaliknya, bahwa menebar perdamaian dan menyemai ketenteraman merupakan kewajiban dasar seorang Muslim.

Yang disoroti dalam kajian ini adalah pemikiran Lord Meghnad Desai dalam bukunya *Rethinking Islamism: The Ideology of the New Terror*, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemikiran tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bagaimana jika pemikiran Desai tersebut diadopsi Muhammadiyah dan Nahdlatul

²*Ibid.*, 9.

Ulama guna pembenahan dan pembinaan serta pembangunan hukum dan manusia di Indonesia? Sesungguhnya kedua organisasi besar Islam Indonesia tersebut telah memberikan andil yang besar terhadap perjuangan dan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, akan tetapi dalam perjalanan pajuangnya selama ini belum tampak hasil yang maksimal terhadap pembangunan hukum positif di negeri ini akibat pemberlakuan *status quo* hukum produk lama oleh penguasa yang sesungguhnya bagi masyarakat yang sosiologis-relegius di mana Islam sebagai *moyority*, hal tersebut (status quo hukum produk penjajah) sudah tidak pantas berlaku lagi, menurut Lord Meghnad Desai.

B. Pemikiran Islam Sebelum Lord Maghnad Desai

Pemikiran Islam Kontemporer secara umum muncul karena dua faktor utama. *Pertama*, faktor eksternal, yakni (sebagai respon terhadap pemahaman kembali sejarah umat Islam dari masa ke masa, lebih fokus pada keterpurukan umat Islam dalam berabad-abad lamanya akibat) perlakuan semena-mena kaum imperialisme Barat serta dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. *Kedua*, faktor internal, yakni berbagai negara yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam, tidak dapat bekerja sama guna membangun Islam, dan bahkan dalam pendiktean Eropa dan Amerika Serikat.

Ahmad Syafii Maarif³ mengatakan bahwa ide melaksanakan syari'at Islam di Indonesia tidak lenyap dari konstitusi Republik Indonesia, tetapi pertanyaan kita: Prinsip-prinsip yang mana yang harus dilaksanakan? Jawaban terhadap pertanyaan sentral inilah yang menentang sarjana-sarjana Muslim, para ulama dan intelektual muslim Indonesia. Karena itu mutlak perlu bagi mereka untuk mempertanyakan dan memikirkan embali hukum-hukum syari'at tradisional berdasarkan pemahaman yang jenius terhadap al-Qur'an dan al-Hadits. Bahwa berbicara secara untelektual, masa

³Ahmad Syafii Maarif, lahir tanggal 31 Mei 1935 di Sumpurkudus, Sumatera Barat adalah dosen FPIPS IKIP, IAIN Aunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pernah belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lintau (1953) dan Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai sarjana muda (1964). Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada Northern Illinois University (1975) dan memperoleh gelar M.A. dalam ilmu sejarah pada Ohio University, Athens, Amerika Serikat (Desember 1980). Gelar Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari The university of Chicago, Chicago Amerika Serikat (Desember 1982), dengan disertasi berjudul *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Konstituent Assembly Debates in Indonesia*. Menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada periode setelah Amin Rais dan sebelum Din Syamsudin (lihat Ahmad Syafii Maarif dalam Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1996.

depan di Indonesia tampaknya akan banyak bergantung kepada berhasil atau gagalnya umat Islam merumuskan kembali hukum-hukum syari'at untuk memenuhi kebutuhan umat sekarang ini.

Proses Islamisasi yang cepat dan hebat dalam masyarakat kontemporer Indonesia, benar-benar menuntut suatu bingkai kerja intelektual yang kukuh, di dalamnya prinsip-prinsip moral dan etik al-Qur'an dapat diformulasikan dengan penuh makna dan sistematis, dan kemudian di atas landasan prinsip-prinsip moral inilah, prinsip-prinsip Islam yang lain ditegakkan dengan mantap. Dalam jangkauan maknanya yang komprehensif inilah sebenarnya, peran utama dari kerja ijtihad.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa salah satu tujuan pokok dari kajian ini ialah mencoba menjelaskan situasi religius-intelektual umat Islam Indonesia. Sekiranya kajian ini telah memberikan sesuatu kepada pencapaian tujuan itu, penulis merasa telah menyumbangkan sebuah batu merah bagi perumahan Islam yang segar dan lestari di Nusantara tercinta ini.

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 tahun 1953 di Purwokerto yang salah satu keputusan penting yang dihasilkannya adalah membentuk suatu panitia yang disertai tugas menyusun konsep Negara Islam – Balduro Toyyibatun Warobun Ghafur – dan pembentukan panitianya diserahkan kepada PP Muhammadiyah.⁴ Atas keputusan Mukhtamar tersebut, PP Muhammadiyah menyelenggarakan rapat PP yang kemudian memutuskan dengan menugaskan kepada Prof. Abdul Kahar Muzakir, salah seorang anggota PP yang terpilih dalam Mukhtamar untuk menyusun konsep negara Islam.⁵

Ide negara Islam yang dirumuskan oleh panitia yang dibentuk oleh PP dengan menunjuk Abdul Kahar Muzakir, yang tugas itu baru disampaikan pada sidang Tanwir dua tahun kemudian. Nampaknya ide negara Islam telah dipikirkan oleh Muhammadiyah sebagai lembaga pada dekade 1950-an. Gagasan “negara Islam” tercermin dalam dasar dan tujuan organisasi, program partai, tulisan cendekiawan,

⁴PP Muhammadiyah. *Buah Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto* (Yogyakarta : Panitia Pusat Mukhtamar Muhammadiyah, 1953, 1, lihat pula: Syaifullah. *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi* (Jakarta: Grafiti), 1997, 99.

⁵Abdul Kahar Muzakir, “Konsep Negara Islam” (Laporan tugas yang disampaikan dalam konferensi Tanwir Muhammadiyah Pekalongan, 21-24 Juli 1954), lihat pula Syaifullah, *Ibid*.

serta bersatunya golongan Islam dalam konstituante untuk menuntut “Dasara Islam” bagi Republik Indonesia ini dalam UUD-nya.⁶ Majelis Konstituante merupakan arena lanjutan dari polemik mengenai dasar negara yang pernah mencuat pada sidang-sidang BPUPKI atau pun PPKI, bagi kalangan Islam, sungguh pun representasinya dalam majelis tersebut masih belum mampu mengalahkan kalangan yang anti negara Islam dan dasar negara Islam, tetapi mereka berupaya meyakinkan golongan kebangsaan agar dapat menerima usulan mereka tentang konsep-konsep Islam.⁷

Berkenaan dengan negara, Muzakir mengungkapkan, bahwa Islam bukan hanya merupakan agama, tetapi juga negara. Beliau mengatakan, kita berpaham bahwa agama Islam itu adalah tauhid, iman, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, undang-undang, peraturan, kebudayaan, dan pedoman hidup yang di karuniai kepada Rasulullah dengan jalan wahyu untuk menjadi pedoman hidup bagi semua manusia di dunia ini, dan apabila mereka dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, bukan saja mereka akan mencapai kehidupan yang sentosa, aman, sejahtera, bahagia dan mempunyai nilai tinggi dalam arena bangsa-bangsa umat manusia, akan tetapi juga akan hidup di akhirat nanti. Jadi, kesimpulan Muzakir atas paham ini, Islam adalah bukan agama saja, tetapi agama dan negara. Negara dan agama dalam pandangan Muzakir bertindak suatu yang sulit dipisahkan, dan pemikiran ini menjadi pemikiran Muhammadiyah, karena Muzakir bertindak dan bicara atas nama Muhammadiyah, karena ia ditugaskan untuk merumuskan konsep “Negara Islam” oleh PP Muhammadiyah.⁸

KH. Hasyim Asy’ari⁹ juga peduli pada kondisi politik umat Islam. Selama masa awal kemerdekaan Indonesia, ia sedih karena beberapa orang berusaha menggunakan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Beliau berkata :

⁶Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES), 1996, 120.

⁷Syarifuddin Jurdi, *Negara Muhammadiyah Mendekap Politik dengan Prhitungan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 2005, 85.

⁸*Ibid.*, 86.

⁹KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, lahir di Gedang, Jombang 24 Dzulaqa’dah 1287 H / 14 Februari 1871 M. Salah satu karya yang menonjol darinya adalah terpilihnya beliau sebagai Rois Akbar Nahdlatul Ulama pada saat berdirinya organisasi kemasyarakatan tersebut pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. Lihat Syaifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Pesantren* (Bandung: Alma’arif), 1977, 80.

“Kita menemukan bahwa peran masyarakat Muslim dalam arena (politik) ini sangat tidak penting. Pengaruh agama dalam arena politik di Indonesia sangat lemah, bahkan mati. Bahkan, ada bahaya yang lebih besar lagi yaitu Islam telah digunakan oleh sebagian orang sebagai kendaraan mencapai tujuan-tujuan dan harapan-harapan mereka baik dalam bidang politik maupun pribadi. Sangatlah berbahaya bila masyarakat memandang mereka tindakannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagai Muslim.”¹⁰

Beliau selanjutnya membandingkan kondisi politik ketika itu dengan politik pada masa awal kemunculan Islam. Beliau percaya bahwa pondasi politik pemerintahan Islam yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad saw., Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mempunyai tiga tujuan, yaitu :

1. Memberi persamaan bagi setiap Muslim.
2. Melayani kepentingan rakyat dengan jalan perundingan.
3. Menjaga Keadilan.¹¹

Beliau menyatakan lebih lanjut bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad saw. meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana memilih kepala negara...jadi, pemilihan kepala negara dan banyak hal lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan, (dan umat Islam) tidak terikat untuk mengikuti suatu sistem. Semua (sistem) dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat.

Namun, beliau menekankan bahwa ajaran Islam “tidak akan berjalan dengan baik selama kepentingan masyarakat Islam terpecah-pecah” Karena itu, beliau menganggap *tujuan akhir politik Islam di Indonesia adalah pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan*, bukan hanya bibir saja. Jadi, beliau menyatakan bahwa “Kita, masyarakat Indonesia tidak ingin perebutan posisi kepemimpinan, kita hanya ingin mereka yang menduduki dan memegang kepemimpinan negeri ini melaksanakan ajaran Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Yang Maha Suci dan Agung.”¹²

7Khuluq, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LkiS), 2000, 63.

¹¹*ibid.*

¹²*ibid.*, 64-65.

Pemikiran prima seperti tersebut belum mendapat tempat di hati para pemegang amanah pengelola Negara, para petinggi dan penguasa Negara. Impian Islam sebagai Hukum Positif dapat dikatakan keadaannya masih ibarat jauh panggang dari api. Realitas kehidupan berbangsa dan bernegarapun masih jauh dari tujuannya, sebagaimana yang tampak bagaikan sinetron dalam televise-televise serta banyak menghiasi berbagai berita media cetak di negeri ini. Sekalipun masih banyak warga negar yang memiliki sifat amanah, tabligh, siddiq dan fathanah, akan tetapi jika hukum positif masih berlaku produk yang lama, maka kita tidak dapat mengharap banyak dari mereka yang yang baik-baik dan amanah itu.

C. Pemikiran Islam Kontemporer Lord Meghnad Desai

Sebuah buku '*Berpikir Kembali tentang Islamisme*'¹³ yang ditulis oleh Lord Meghnad Desai meneliti dan menganalisa ideologi di balik terorisme global. Buku ini membuat sebuah pembedaan antara Islam sebagai agama dan Islamisme - ideologi politis. Buku ini mengklaim bahwa Islamisme global merupakan tantangan militer yang paling serius bagi dunia dan menurut Desai, akan berlanjut menjadi hal yang sama untuk 20 tahun atau sekitar berapa tahun.

Seorang ahli ekonomi dan tenaga kerja terkenal, Meghnad Desai, mengatakan: "Islamisme bagi saya adalah sebuah ideologi dan merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan baik perilaku manusia maupun kekuasaan politik. Ideologinya, yang membuat saya tertarik adalah Islamisme global yang merupakan sebuah ideologi yang mengklaim bahwa para Muslim dalam sejarah telah diperlakukan dengan sangat buruk, dan bahwa telah datang waktunya bagi para Muslim untuk merebut kembali kekuasaan ke tangan mereka."

Di dalam bukunya, ia menguraikan tiga bentuk Islamisme –*Islamisme moral*, *Islamisme nasional* dan yang ketiga adalah *Islamisme global*. Ia menjelaskan perbedaan antara ketiganya dan mengatakan, "Islamisme moral mengatakan bahwa negara dengan mayoritas Muslim hendaknya bertindak menurut ajaran Islam. Islamisme nasional mengatakan bahwa, jika ada mayoritas Muslim, pemerintah

¹³Judul aslinya *Rethinking Islamism: The Ideology of the New Terror*

sebaiknya mengikuti Qur'an sebagai panduannya dan hukum Syariah dan seterusnya. Sementara Islamisme global merupakan suatu gagasan yang sangat berbeda. Islamisme global mengatakan bahwa kemunduran Muslim pada abad 20 dan abad 21 disebabkan oleh kekuatan pengikut salib barat, dan para Muslim akan harus memahaminya dan berjuang mereklamasi kembali kekuasaan."

Juga Islamisme global telah menyimpangkan nilai-nilai Islam dan memanfaatkan agama dan Desai setuju dengan ini sebab ia mengatakan, "Ini adalah cerita Muslim di seluruh dunia. Tentang bagaimana mereka telah ditipu oleh kekaisaran barat bukannya masyarakat lain. Sekarang saya harus mengatakan hal ini tentang Muslim Sunni, tidak lainnya. Mereka percaya bahwa mereka telah diperlakukan dengan sangat buruk, jadi bukan kesalahan mereka oleh orang lain." Masyarakat Muslim percaya bahwa keluhan dan permasalahan mereka dimulai dengan robohnya kekaisaran Ottoman. Mereka menyalahkan Inggris dan pengkhianatan Amerika.

Maka, bagaimana keluhan mereka dibenarkan? Desai merasakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah penyederhanaan dari masalah yang rumit. Ia menjelaskan, " Penyederhanaan mmuncul dalam perkataan kita semua adalah satu dan tidak ada perbedaan di antara kita. Ada penjahat tunggal dan semua batasan kita adalah disebabkan penjahat itu. Maka, untuk membawa kita keluar dari keadaan yang menyedihkan ini, kita harus mengusir penjahat dan kemudian semua akan menjadi baik."

Ketika kekaisaran Ottoman dihancurkan, Timur Tengah disekat oleh sebuah mandat Liga Bangsa-Bangsa antara Inggris dan Perancis. Kemudian Inggris berjanji pada bangsa Yahudi bahwa mereka akan mendapatkan tanah tumpah darah di Palestine setelah Perang Dunia II dan sesudah itu Jerusalem jatuh ke tangan non-Muslim dan menyelesaikan semua permasalahan telah muncul. Lagi pula, mereka juga merasakan bahwa semua permasalahan pada tempat-tempat seperti Chechnya, Kosovo Kashmir dan lain-lain adalah disebabkan oleh Barat.

Jadi, apa yang dilakukan Islamisme global adalah – pertama menyederhanakan dan kemudian melebih-lebihkan. Penyederhanaan ini tentu saja, mengabaikan ketidakadilan bahwa Muslim sudah menumpuk pada sama lain, seperti

perang Iran-Iraq dan perang Teluk pertama. Tetapi karena permusuhan telah ditujukan pada para Muslim, mereka merasa bagaimanapun sedapatnya mereka perlu membalas dendam mereka pada Barat- dan perang gerilya adalah metoda pilihan mereka.

Menurut buku ini, kemunduran yang lain yang melemahkan semangat para Muslim, adalah kehancuran Perserikatan Soviet. Mereka telah menanti-nanti sosialisme yang menyediakan mereka jalan keluar dari permasalahan mereka – politis dan ekonomi – tetapi ketika Perserikatan Soviet roboh, mereka tidak tahu apa yang akan mengisi kevakuman itu. Bukanlah akan menjadi kapitalisme barat, sehingga mereka berbalik kedalam dan mencari bantuan untuk agama mereka. Dan di situlah Islamisme global dan fundamentalisme masuk mengisi.

Gejala global yang lain yang membuat para Muslim merasa seperti ada suatu komplotan Barat untuk mengikis mereka dan perluasan kekuasaan Amerika adalah "penyebaran globalisasi". Desai setuju dan mengatakan, " Tidak hanya Muslim tetapi banyak orang melihat globalisasi sebagai hegemony Amerika, menyebar lebih luas setelah robohnya Perserikatan Soviet. Mereka tidak melihat diri mereka bersaing dengan AS, seperti negara India dan China yang bisa bersaing dengan AS. Mereka melihat globalisasi dan kapitalisme liberal semata-mata sebagai manipulasi Amerika yang mendatangi mereka."

Desai juga merasakan bahwa India perlu mengenali fakta bahwa terorisme global akan membuat India sakit kepala seperti Barat sebab Osama bin Laden melihat India sebagai bagian dari pengikut salib Barat. Ia menambahkan, " Ia melihat Kashmir sebagai pertempuran dasar bahwa para Muslim sedang memberantas Barat." Maka, pertanyaan besar dari sudut pandang India adalah bahwa, apakah India disiapkan untuk menerima Islamisme global? Desai merasakan bahwa India mungkin masih akan menipu diri sendiri bahwa India dapat mengakui imunitas dari kegusaran para Muslim karena sejarahnya yang mendukung pemerintahan diktator Muslim, menjadi bagian dari pergerakan non-alignment dan juga karena populasi Muslim yang cukup besar.

D. Analisa

Lord Meghnad Desai mengusng tiga bentuk Islamisme, *Islamisme moral*, *Islamisme Nasional* dan *Islamisme Global*. Islamisme moral, ialah bahwa negara dengan mayoritas Muslim hendaknya bertindak menurut ajaran Islam. Islamisme nasional, ialah bahwa jika ada mayoritas Muslim, pemerintah sebaiknya mengikuti Qur'an sebagai panduannya dan hukum Syariah, dan seterusnya. Islamisme global ialah bahwa kaum Muslimin harus memahami sejarah keterbelakangannya (setelah kejayaannya selama tujuh abad) dan berjuang mereklamasi kembali kekuasaan.

Apa yang diproposisikan Desai ini wajar kalau mendapat sambutan positif dari berbagi kalangan, paling tidak merupakan bacaan sangat menarik yang dapat mendorong ilmuan Muslim dan bahkan para birokrat dan politisi Muslim untuk setidaknya mencari jawaban atas pertanyaan : Secara normatif doktrinal Islam itu sebagai *rahmat li al-'aalamin*, lalu secara fungsional, *kapankah hal itu bisa terwujudkan?*

Lord Meghnad Desai, termasuk pemikir Islam kontemporer, sekalipun konsep yang diusung dapat saja dinilai belum seratus persen menjawab persoalan, akan tetapi setidaknya ia telah berupaya agar Islam dan Islamisme itu didialogkan baik secara internal maupun eksternal, karena secara realita hubungan (intern Islam dan antara Islam dengan Barat) semakin dekat baik secara geografis maupun komunikasi di era global ini.

Apa yang ditawarkan Desai di atas dan dengan membaca pemikiran kontemporer Islam Indonesia, maka jika menoleh ke masa Nabi SAW dan secara normatif doktrinal, bukannya yang penting itu *daulat Islam*, melainkan syari'ah Islam yang wajib dihidup-hidupkan di mana ada komunitas tempat berpijak kaum Muslim. Selain kendala internal dan eksternal yang harus siap sedia menghadapinya, maka ide dan tawaran Desai itu lebih mengarah (alternatif awal) kepada pemberlakuan syari'at Islam ketimbang *daulah Islamiyah*, kendati hal itu bisa saja dan sah-sah saja dilakukan manakala tepat pada waktunya untuk hal itu diwujudkan (*daulah Islamiyah*).

Dua organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (bukan bukan berarti mengentengkan organisasi Islam lainnya di negeri ini).

Sekalipun bukan sebagai organisasi politik, akan tetapi keberadaan keduanya (sejak awal berdirinya) telah memberikan andil besar terhadap perjuangan membebaskan negeri ini dari cengkeraman dan penjajahan Barat, Belanda utamanya, juga dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI dari tangan sekutu yang tidak menghendaki adanya kemerdekaan bagi negeri ini.

Secara devacto Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tetap memiliki peluang dan kemampuan besar untuk mendatangkan perubahan menuju perbaikan terhadap nasib bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di kala negeri ini terombang-ambing oleh rapuhnya pilar-pilar tegaknya Negara dan hukum.

Apabila Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan hukum di negeri ini, sebagaimana komitmen untuk memberantas korupsi (yang sudah parah dan fatal itu), maka sesungguhnya merupakan momen yang tepat bagi kedua organisasi besar Islam Indonesia ini untuk merapatkan barisan guna mewacanakan dan sekaligus merancang-bangunkan “*Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya*”, dan bukan *Daulat Islamiyah*. Mengupayakan bagaimana Hukum Islam dapat menjadi Hukum Positif di rumahnya sendiri, sebagai pekerjaan rumah para Cendekiawan dan Cendekiawan Muda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kini dan mendatang.

E. Penutup

Beberapa kontribusi Lord Meghnad Desai terhadap dunia Islam dikemukakan di bawah ini.

1. Desai telah memberi kita panduan yang sangat diperlukan bagi peranan Islam yang kompleks di dalam konflik geopolitis saat ini. Dengan membawa bersama-sama kekayaan pengetahuan historis dengan pengertian mendalam yang kuat ke dalam globalisasi, ia menunjukkan bahwa Islam global adalah suatu pergerakan revolusioner dalam banyak cara seperti pada abad ke duapuluh.

2. Buku Desai ini layak mendapatkan perhatian para muslim maupun non-Muslims dan mereka yang siap untuk diberi informasi dengan lebih baik seputar Islam dan Islamisme.
3. Buku Desai ini cukup meprovokasi pikiran, terdapat banyak dalam buku ini bagi para Muslim dan non-Muslim untuk mempertimbangkannya.
4. Buku Desai ini sangat berguna bagi ilmuwan Muslim dan pembuat kebijakan di bidang politik serta pimpinan organisasi sosial keagamaan di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
5. Realitas kehidupan kini menunjukkan instabilitas hukum akibat rapuhnya pilar-pilar tegaknya hukum dan Negara, yangt pada gilirannya akan bisa berujung pada hilangnya kewibawaan dan hargadiri bangsa di mata dunia.
6. Sementara di sisi lain mata dunia tertuju kepada Islam, dalam hal ini Islam Indonesia, di mana Ia, Islam Indonesia selain sebagai majority, padahal Ia asalnya agama pendatang atau agama tamu, akan tetapi dapat berhasil dalam berbagai bidang kehidupan, ini terjadi pada masa krisis global baru-baru ini.
7. Keinginan berlakunya *hukum positif Islam* (pidana dan perdata) sebagaimana yang ada di benak hati sebagian besar umat Islam di Indoneia atau yang ada dalam analisa pemikiran Lord Meghnad Desai, terutama yang menyangkut persoalan besar bangsa yang sudah tidak mampu diatasi dengan undang-undang dan hukum produk lama. Sementara ini baru sebagian kecil saja yang mulai terjawab dengan adanya komplikasi hukum perkawinan dan otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, "*Syari'at Islam*".
8. Setelah tumbangny sistem ekonomi liberalis dan capitalis serta lainnya, maka Islam, dalam hal ini sistem ekenomi atau Bank Syari'ah yang kini menjadi pilihan atau harapan Jika benar pemikir-pemikir Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkomitmen terhadap berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif, maka banyak pemikir dan pengamat hukum penuh berharap segera datangnya iklim baru dalam menyejukkan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ribuan pulau ini.

Wa Allah A'lam bi Al-Shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Desai, Lord Meghnad, *Rethinking Islamism: The Ideology of the New Terror*, 2007.
- Jurdi, Syarifuddin. 2005, *Negara Muhammadiyah Mendekap Politik dengan Prhitungan, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Khuluq, Lathiful. 2000, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, LkiS Yogyakarta.
- Maarif, Ahmad Syafii, 1996, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta.
- Noer, Deliar. 1996, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta
- Saeed, Abdullah, *Islamic Thought: An Introduction*
- Saikal, Amin. 2006, *Islam & Barat, Konflik atau Kerjasama*, Sanabil Pustaka, Jakarta.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*
- Yunanto, S. et. al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*
- Zuhri, Syaifuddin. 1977, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, Penerbit : Alma'arif Bandung.